

## **Implementasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomer 82 Tahun 2019 Tentang**

### **Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**

#### **Di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar**

Implementation Of Karanganyar Regency Regulation Number 82 Of 2019 Concerning  
Instructions For Implementing Population Administration  
In Kebakkramat District, Karanganyar District

**Fadhilah Rizky Saputra<sup>1</sup>, Joko Suranto<sup>2</sup>, Sri Riris Sugiyarti<sup>3</sup>**

Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi  
[Fadhilahrs@gmail.com](mailto:Fadhilahrs@gmail.com), [jokosuranto052@gmail.com](mailto:jokosuranto052@gmail.com), [ririss68@gmail.com](mailto:ririss68@gmail.com)

#### **Abstrak**

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu pedoman untuk memudahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan pelayanan terkait Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Masih ditemukan masyarakat Kecamatan Kebakkramat yang belum memahami pentingnya e-KTP bahkan generasi muda juga belum memahami pentingnya e-KTP, dan banyak masyarakat yang malas untuk datang langsung ke kantor Kecamatan Kebakkramat, biasanya hanya keluar rumah. berkas kepada pegawai dan biasanya masyarakat memberikan suap berupa uang kepada pegawai agar proses pembuatan e-KTP dipercepat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan empat unsur yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan Kebakkramat, bagian tata kelola, operator pembuat e-KTP dan masyarakat Kebakkramat. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pelayanan pembuatan e-KTP di Kecamatan Kebakkramat dapat dikatakan baik, walaupun terdapat beberapa kesimpangsiuran dan ketidakpahaman terkait media sosial dan sumber informasi, meskipun terdapat beberapa kekurangan di masyarakat. Pemahaman tentang pembuatan e-KTP, pegawai kecamatan akan terus meningkatkan informasi agar masyarakat mudah memahaminya dengan melakukan sosialisasi dan komunikasi.

**Kata kunci:** Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi

### **Abstract**

*Karanganyar Regent Regulation Number 82 of 2019 concerning Guidelines for Implementing Population Administration in Kebakkramat District, Karanganyar Regency is one of the guidelines to make it easier for the Population and Civil Registration Service to carry out services related to Population Administration. This research aims to analyze and describe the implementation of Karanganyar Regent Regulation Number 82 of 2019 concerning Guidelines for Implementing Population Administration in Kebakkramat District, Karanganyar Regency. There are still people in Kebakkramat District who don't understand the importance of e-KTP, even the younger generation doesn't understand the importance of e-KTP, and many people are too lazy to come directly to the Kebakkramat District office, usually just leaving the house. files to employees and usually people give bribes in the form of money to employees so that the process of making e-KTPs is accelerated.. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection was carried out using interview, observation and documentation techniques . This research analysis uses four elements, namely data collection, data reduction, and drawing conclusions. The technique for determining informants for this research uses purposive sampling and snowball sampling techniques. The informants in this research were 5 people consisting of the Kebakkramat District Secretary, the governance section, the e-KTP maker operator and the Kebakkramat community. The results of the research conducted by the author show that the e-KTP making service in Kebakkramat District can be said to be good, although there is some confusion and misunderstanding regarding social media and information sources.*

**Keywords:** *Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Meningkatnya jumlah penduduk serta makin meluasnya kepentingan masyarakat, sehingga menyebabkan negara mengalami kemajuan dalam berbagai sektor serta menuntut suatu negara agar dapat mengikuti perkembangan zaman berdasarkan ritne yang sedang berjalan. Hal ini kemudian menjadikan pelayanan pemerintahan di berbagai sektor mangalami beragam kendala, misalnya dalam ranah kedisiplinan waktu, proses pembiayaan

suatu layanan, metode penagihan, penagihan ilegal, dan lain sebagainya yang jauh dari kata ideal sebuah aktivitas layanan publik. Hal ini harus menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas lembaga nasional untuk menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat lokal.

Pelayanan publik dapat diartikan suatu bentuk pelayanan pemerintah yang menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat setempat. Pegawai pemerintah diharapkan dapat bekerja secara wajar, efektif, dan efisien agar pelayanan yang

diberikan pemerintah konsisten dengan proses bisnis. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa pelayanan publik merespon kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, dengan mengikuti aturan dan prosedur dasar yang telah ditetapkan.

Brrsumber pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan Kependudukan, yang menyatakan dalam pasal 101 huruf a bahwa pemerintah wajib memberikan NIK kepada warganya, pemerintah telah menerapkan sistem kependudukan terkini, yang disebut E-KTP..

Implementasi merupakan aspek penting dalam kebijakan publik. Implementasi mengacu pada tindakan dan langkah yang diambil oleh aktor kebijakan publik berdasarkan formulasi yang dianut. Implementasi kebijakan adalah langkah lain yang dilakukan individu, kelompok, serta pemimpin dan pejabat pemerintah maupun pihak swasta agar dapat meraih tujuan yang telah ditentukan pada ketetapan serta kebijakan yang berlaku.

Sasaran utama dari penerapan tersebut dilakukan agar memberikan *feedback* atau umpan balik pada penerapan ketetapan serta berjalannya proses pemeriksaan apakah tahapan penerapan tersebut telah disesuaikan pada rencana

serta standarisasi yang telah ditentukan. Kemudian, hambatan serta problematika apa saja yang timbul dalam tahapan implementasi yang telah dilakukan proses identifikasi.

Tahapan dari penerapan atau implementasi bisa saja terjadi, apabila mayoritas proses perlu dilakukan penungguan sebab membutuhkan persiapan yang matang. Penerapan kebijakan sangatlah kompleks dan memerlukan kehati-hatian. Bahkan ketika menyiapkan alternatif politik, kita harus bertanya bagaimana setiap alternatif akan diterapkan. Negara sering kali mengalami kegagalan dalam menerapkan kebijakan. Kegagalan kebijakan disebabkan oleh kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Namun, ada kemungkinan besar implementasinya salah, atau eksekusi kebijakannya salah. Implementasi adalah proses membawa kebijakan kepada masyarakat untuk mencapai hasil yang diinginkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Memahami Perumusan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan Publik Pekerjaan Umum, menurut Salusu, menegaskan Opsi yang dimaksud dimaksudkan untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan.

Kebijakan merupakan serangkaian kegiatan, tindakan, pengaturan rencana

program dan keputusan yang diambil oleh aktor untuk memecahkan suatu masalah. suatu kebijakan sangatlah penting untuk mencapai tujuan suatu lembaga. Ketetapan meliputi pada dua aspek antara lain, (a) kebijakan atau ketetapan yang terdiri dari suatu respons pada kondisi yang tengah terjadi agar dapat mewujudkan harmonisasi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mampu menyebabkan eskalasi terhadap tindakan para pihak yang diberlakukan secara tidak rasional pada proses kolaborasinya, (b) kebijakan memiliki definisi sebagai praktik sosial. Kebijakan bukan substansi yang memiliki sifat tunggal serta terisolir (Iskandar, 2012:1).

Dengan kata lain kebijakan merupakan suatu yang diambil oleh para politisi(pemerintah) berdasarkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Peristiwa ini tidak asing agi masyarakat, melainkan muncul dari sebuah tahapan kehidupan masyarakat luas yang terisolir dan mandiri.

Seseorang atau organisasi dapat membuat kebijakan dengan melakukan sejumlah tindakan, program, atau kegiatan agar dapat meraih suatu tujuan tertentu. Kebijakan memiliki ciri khas sebagai suatu prinsip yang meliputi atas masukan, tahapan serta *outcome* (Hanafi dan

Ma'sum, 2015:34). Proses kebijakan meliputi pada tahapan perumusan kebijakan serta penerapan kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Kebakramat merupakan salah satu instansi yang melayani masyarakat Kecamatan Kebakramat di Kabupaten Karanganyar. Kecamatan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Dinas Pengelolaan Kependudukan Kabupaten memfasilitasi pengelolaan kependudukan dan pendaftaran penduduk (termasuk pembuatan e-KTP) bagi warga Kecamatan Kebakramat

Berkaitan pada hasil pengamatan yang telah dilaksanakan oleh peneliti di Kecamatan Kebakkramat selama satu minggu yang mana umlah pembuatan e-KTP dalam beberapa Desa yang ada di Kecamatan Kebakkramat memiliki total 16 pemohon pembuatan e-KTP yang diantaranya Banjarharjo 0 , Alastuwo 4 ,Macanan 3 , Nangsri 2 , Kemiri 1 , Kebak 1 , Waru 2 , Pulosari 2 , Malangaten 0 ,Kaliwuluh 1, data tersebut diperoleh dari observasi di Kecamatan Kebakkramat serta di Temani oleh pegawai Kecamatan Kebakkramat saudari velly, Maka dari data yang ada di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih ditemukan

masyarakat di Kecamatan Kebakkramat kurang mengerti pentingnya e-KTP bahkan anak muda juga kurang memahami tentang pentingnya e-KTP,serta banyak masyarakat malas datang langsung ke kantor Kecamatan Kebakkramat biasanya hanya menitip berkas kepada pegawai serta biasanya masyarakat memberikan sogokan berupa uang kepada pegawai agar proses pembuatan e-KTP dipercepat.

Akibat permasalahan tersebut, pelayanan produksi e-KTP di Kecamatan Kebakkramat belum maksimal. Di sisi lain, permasalahan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pendekatan dengan warga di Kecamatan Kebakkramat, tempat pembuatan e-KTP. Misalnya, sosialisasi merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi peraturan Bupati Karanganyar Nomer 82 Tahun 2019 mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar?

### **Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis dan mendiskripsikan mengenai implementasi peraturan Bupati Karanganyar Nomer 82 Tahun 2019

mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

## **KAJIAN TEORI**

### **Kebijakan publik**

Kebijakan adalah upaya untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan serta cara untuk memecahkan masalah menggunakan sumber daya yang ditentukan pada jumlah waktu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ketetapan dapat dikatakan sebagai substansi yang sangat signifikan sebab pada dasarnya, ketetapan mampu difungsikan sebagai panduan agar dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama.

### **Implementasi Kebijakan**

Proses memberlakukan undang-undang yang melibatkan semua pihak, organisasi, proses, dan metode terkait untuk sepenuhnya melaksanakan kebijakan agar dapat meraih tujuan dalam kebijakan yang sudah ada sebelumnya disebut dengan

proses penerapan atau implementasi kebijakan. Penelitian kebijakan yang berfokus pada tahapan implementasi kebijakan yang dikatakan sebagai penelitian implementasi. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan masukan tentang bagaimana kebijakan diterapkan dan untuk menentukan apakah proses tersebut mengikuti rencana atau standarisasi yang telah ditentukan, kemudian agar dapat mengidentifikasi sebuah problematika atau kendala yang timbul pada tahapan implementasi (Mulyadi, 2015:50).

Agar proses kebijakan berhasil, proses implementasi kebijakan harus bergerak cepat karena tanpanya, kebijakan tidak akan dilaksanakan. Sebagian besar pemerintah di dunia modern dapat mengadopsi undang-undang, tetapi mereka belum dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar akan memiliki pengaruh dan perubahan untuk kepentingan publik.

Hal ini disebabkan oleh birokrasi atau rendahnya kapasitas implementasi organisasi dan aktor dalam menerapkan kebijakan, yang meningkatkan risiko kesenjangan implementasi — kondisi dalam proses pembuatan kebijakan yang memungkinkan perbedaan antara hasil yang diinginkan dan yang diharapkan.

Proses penyampaian ketetapan untuk seluruh masyarakat supaya mampu menghasilkan capaian yang telah diinginkan biasa disebut dengan implementasi (Afan Gaffar, 2009: 295). Salusu mengklaim dalam bukunya *Memahami Perumusan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan Publik Pekerjaan Publik Pilihan* tersebut memiliki tujuan agar dapat meraih sasaran dari kebijakan yang telah disusun sebelumnya.

Implementasi adalah proses membawa kebijakan kepada masyarakat untuk mencapai hasil yang diinginkan (Afan Gaffar, 2009: 295). *Memahami Perumusan, Pelaksanaan, dan Evaluasi*

Kebijakan Publik Pekerjaan Umum, menurut Salusu, menegaskan Opsi yang dimaksud dimaksudkan untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan.

Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan langkah krusial dalam keseluruhan struktur kebijakan yang melibatkan pejabat, individu, instansi pemerintah, dan pihak swasta. Melalui prosedur ini, kelompok-kelompok ini telah sepakat, dan keberhasilan atau kegagalan suatu tujuan dapat berdampak pada proses kebijakan secara keseluruhan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Pada aktivitas kajian ini diterapkan dengan mengimplementasikan jenis penelitian secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

### **Lokasi Penelitian**

Aktivitas penelitian ini dilakukan di beberapa kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Karanganyar, salah satunya Kecamatan Kebakkramat.

## **Jenis Data dan Sumber Data**

### **a. Jenis data**

Pada proses kajian kualitatif, jenis data yang diimplementasikan pada penelitian ditentukan pada tindakan, pendapat, motivasi serta perilaku holistik.

### **b. Sumber data**

Kemudian, sumber data yang terdapat pada kajian ini terbagi atas dua instrumen, antara lain.

- **Data Primer**

Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung pada saat melakukan aktivitas penelitian.

- **Data Sekunder**

Data Sekunder ialah data yang didapatkan tidak langsung pada saat penelitian dilakukan.

## **Teknik Penentuan Informan**

Metode yang difungsikan pada proses penentuan informan atau responden pada kajian ini ialah metode *purposive sampling* serta *snowball sampling*. Responden yang difungsikan dalam kajian ini antara lain sekretaris yang berkedudukan di Kecamatan Kebakkramat, kepala seksi tata pemerintahan di Kecamatan Kebakkramat, operator pembuatan e-KTP

di Kecamatan Kebakkramat serta penduduk yang berdomisili di Kecamatan Kebakkramat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data pada kajian ini ialah metode observasi atau pengamatan, wawancara serta dokumentasi.

### **Validasi Data**

Validasi data yang difungsikan pada kajian ini ialah teknik triangulasi atau metode pemeriksaan pada keabsahan data yang memfungsikan suatu informasi lain di luar data yang digunakan.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam kajian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah metode analisis data yang diutarakan oleh (Miles and Huberman, A.M., & Saldana J., 2014:10) yang menyatakan apabila aktivitas analisis data terdiri atas proses mengumpulkan data, proses kondensasi data, proses menyajikan data serta proses penarikan simpulan terhadap analisis data yang dihasilkan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Pembahasan**

Kecamatan Kebakkramat merupakan suatu organisasi/lembaga publik yang memberikan layanan publik terhadap masyarakat secara spesifik melayani beragam administrasi kependudukan, misalnya layanan publik yang terdapat di Kecamatan Kebakkramat ialah layanan pembuatan e-KTP yang menjadi salah satu produk yang direncanakan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Karanganyar.

Landasan hukum pelaksanaan program pembuatan e-KTP secara nasional antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik,

Konektivitas layanan penerbitan e-KTP di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tingkat kecamatan maupun desa, layanan penerbitan e-KTP di Kecamatan di harapkan dapat memberikan pelayanan yang



memuaskan sehingga masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan e-KTP yang di buat dengan mudah. Mengingat permasalahan yang muncul di atas yaitu mengenai rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuatan e-KTP.

Agar dapat mengetahui tentang penerapan layanan penerbitan e-KTP yang dilaksanakan di Kecamatan Kebakkramat, sehingga peneliti memfungsikan pendekatan proses melalui empat indikasi, antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi ialah penerapan pada layanan penerbitan e-KTP yang terdiri atas, proses transmisi atau penyampaian, kejelasan serta konsistensi informasi.

Penyampaian informasi mengenai sosialisasi e-KTP di Kecamatan Kebakkramat telah dilakukan melalui berbagai cara seperti

pertemuan langsung di desa-desa,serta penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, serta pengiriman surat resmi. Pihak Kecamatan juga bekerja sama dengan pemerintah desa serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar dapat menyampaikan informasi. Namun, ada sedikit kebingungan tentang informasi langsung dari kecamatan, yang sebagian besar diterima melalui perangkat desa.

Kejelasan Informasi mengenai implementasi pembuatan e-KTP di Kecamatan Kebakkramat pegawai Kecamatan merasa bahwa informasi sudah cukup jelas disampaikan kepada masyarakat. Mereka juga menyebut adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tersedia di tempat pelayanan, serta distribusi pamflet melalui media sosial. Namun masyarakat ada beberapa kebingungan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang media sosial tertentu.

Konsistensi Informasi di Kecamatan Kebakkramat menurut pegawai bahwa mengenai konsistensi informasi disampaikan sudah melakukan secara konsisten, terutama melalui pelatihan rutin bagi operator dan rapat pembaruan sistem e-KTP. Mereka juga menyoroti peran perangkat desa dalam menyampaikan informasi yang konsisten kepada masyarakat.

Dari penjabaran diatas mengenai faktor-faktor yang terkait mengenai variabel komunikasi dalam implmentasi pelayanan e-KTP, bahwa diketahui komunikasi dalam pelayanan pembuatan e-KTP di Kecamatan Kebakkramat dilihat dari faktor transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi sudah baik. Meskipun ada beberapa kebingungan dan ketidakpahaman terkait media sosial dan sumber informasi dari kecamatan, upaya sosialisasi dan komunikasi terus dilakukan dengan berbagai metode untuk mencapai keselarasan dan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat.

- b. Sumber daya pada proses penerapan layanan e-KTP di Kecamatan Kebakkramat terdiri atas, staf, informasi, kewenangan serta fasilitas.

Hadirnya SDM atau Sumber Daya Manusia di wilayah

lembaga pemerintahan memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap berhasilnya proses implementasi kebijakan. Dengan pegawai yang cukup dan kompeten maka dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pada proses implementasi layanan penerbitan e-KTP di Kecamatan Kebakkramat para staf diberikan pelatihan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar serta dibantu dengan adanya tenaga harian lepas (THL) hal tersebut sangatlah membantu para pegawai dalam melaksanakan tugasnya di Kecamatan Kebakkramat. Serta pegawai yang sudah berpengalaman siap menggantikan pegawai yang lainnya yang sedang absen, pegawai Kecamatan mengenai pelayanan kepada masyarakat sudah terpenuhi dan pegawai tidak pernah kewalahan dalam melayani pemohon serta anggaran semua sudah diatur oleh Dinas Pencatatan dan Sipil Kabupaten Karanganyar Kantor Kecamatan Kebakkramat hanya menjalankan.

Informasi ialah sumber yang sangat signifikan untuk melaksanakan sebuah implementasi kebijakan. Informasi dalam implementasi pelayanan pembuatan e-KTP di Kecamatan Kebakkramat informasi telah disampaikan dengan baik, baik melalui pamflet, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Tetapi terdapat sedikit kekurangan pemahaman dari beberapa masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh pihak Kecamatan yang melalui media sosial.

Kewenangan implementasi dalam pelayanan pembuatan e-KTP di Kecamatan Kebakkramat Secara umum, persepsi bahwa pegawai menjalankan tanggung jawab sesuai kewenangannya, meskipun ada beberapa masyarakat yang kurang memahami hal tersebut serta masyarakat tidak bisa memastikan sepenuhnya mengenai kewenangan tersebut, namun masyarakat menduga bahwa pegawai telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Sumber daya fasilitas ialah sumber daya yang mampu

memberikan dukungan pada pegawai untuk melaksanakan segala macam operasional yang menjadi sarana dan prasarana pada sebuah lembaga. Sarana serta prasarana di Kecamatan Kebakkramat sudah cukup memadai, termasuk keberadaan peralatan seperti kamera otomatis dan ruangan khusus untuk rekaman e-KTP, tetapi ada catatan mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Kebakkramat mengenai perlunya peningkatan dalam beberapa peralatan yang sudah usang untuk mendukung pelayanan yang lebih baik, terutama mengingat mobilitas penduduk yang tinggi

Dari penjabaran faktor-faktor yang mempengaruhi variabel sumberdaya diatas dapat dilihat dari segi staf atau pegawai sudah mencukupi terlihat bahwa secara umum masyarakat merasa bahwa pelayanan e-KTP di Kecamatan sudah cukup memadai, tetapi masih terdapat potensi untuk meningkatkan beberapa aspek, seperti pemahaman informasi melalui media sosial dan peningkatan sarana prasarana

untuk mendukung pelayanan yang lebih baik

- c. Disposisi implementasi layanan penerbitan e-KTP di Kecamatan Kebakkramat meliputi: komitmen pegawai dan insentif pegawai

Komitmen pada implementasi layanan penerbitan e-KTP di Kecamatan Kebakkramat komitmen telah dijalankan sesuai aturan yang ada, menunjukkan ketaatan pada prosedur yang telah ditetapkan. Serta mengenai Pelayanan Pembuatan e-KTP Pegawai mengikuti arahan pak camat untuk melayani dengan sepenuh hati, menunjukkan kesediaan untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, tidak hanya itu saja para pegawai juga berkerja secara kompeten Meskipun hari Sabtu adalah hari libur biasa, beberapa pegawai tetap masuk sesuai dengan bidangnya, menunjukkan dedikasi terhadap pekerjaan dan tidak lupa mengenai sikap melayani sikap pelayanan yang sudah dilakukan dengan baik serta sesuai pada Standar Operasional Prosesur atau SOP, yang merujuk pada kesopanan

serta keramahan yang diberikan kepada masyarakat luas.

Mengenai insentif dalam implementasi pelayanan e-KTP di Kecamatan Kebakkramat meskipun kantor Kecamatan tidak memberikan insentif, tetapi dari DISDUKCAPIL ada insentif yang diberikan, dan dibagi dengan rata kepada pegawai, hal tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kesejahteraan kepada pegawai. Tetapi untuk masyarakat sendiri kurang Paham tentang Insentif ,kekurangan pemahaman dan pengetahuan tentang insentif, menunjukkan adanya kurangnya akan komunikasi yang lebih baik dari pegawai terkait dengan kebijakan insentif.

Dari penjabaran faktor-faktor variabel dalam implementasi pelayanan e-KTP di atas terlihat bahwa pegawai menekankan pada komitmen terhadap tugas, pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta kebutuhan akan pemahaman yang lebih baik tentang insentif yang diberikan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam pandangan mengenai insentif, keseluruhan jawaban menunjukkan

upaya untuk memberikan pelayanan sepenuh hati kepada masyarakat.

- d. Struktur Birokrasi implementasi pelayanan e-KTP di Kecamatan Kebakkramat yang terdiri atas, Standar Operasional Prosedures (SOP) serta Fragmentasi (Penyebaran tanggung jawab).

Standar Operasional Prosedures (SOP) memiliki peranan yang sangat signifikan pada penerapan layanan penerbitan e-KTP di Kecamatan Kebakkramat. Strukturnya teratur dan terpenuhi sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Struktur hierarki yang dijelaskan dimulai dari pak camat sebagai posisi tertinggi, dengan tugas-tugas yang terbagi secara jelas di bawahnya. Serta dalam pembagian tugas sudah baik dan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Operator, administrasi, dan verifikator telah diisi dengan baik, menunjukkan struktur yang terorganisir dengan baik. Untuk mengenai SOP nya sudah ada dan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. SOP tersebut juga dipastikan tersedia secara tertulis dan terpampang di

tempat yang mudah diakses oleh semua pegawai, Meskipun tidak disebutkan secara spesifik, kesan yang diberikan kepada masyarakat adalah bahwa SOP juga sudah tersedia dan dijalankan dengan baik.

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab ialah aktivitas yang mampu memberikan pengaruh terhadap proses implementasi kebijakan layanan penerbitan e-KTP di Kecamatan Kebakkramat. Pembagian tugas pegawai sudah tertata dengan baik, setiap pegawai melakukan tugas sesuai dengan jobdes mereka masing-masing serta Para pegawai dianggap sudah melakukan tugas mereka sesuai dengan jobdes, menunjukkan bahwa pembagian tugas telah diatur dengan baik.

Dari penjabaran faktor-faktor variabel dalam implementasi pelayanan e-KTP di atas dapat disimpulkan bahwa kedua birokrasi memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, SOP yang sudah tersedia dan dijalankan, serta pembagian tugas pegawai yang sesuai. Hal ini

mengindikasikan bahwa kedua organisasi tersebut memiliki fondasi yang kuat untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Berkaitan dengan analisis serta hasil kajian yang telah dilakukan di lapangan mengenai penerapan kebijakan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2019 mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan admnisitrasi kependudukan di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar (Studi kasus pelayanan e-KTP di Kecamatan Kebakkramat), yang dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan milik George C Edaward III dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pelayanan e-KTP di Kecamatan Kebakkramat para pegawai sudah menjalankan tugasnyadengan baik dan konsiten, hal tersebut karena didukung oleh komunikasi yang aktif dengan masyarakat dengan berbagai macam cara. Meskipun terdapaat beberapa kekurangan dalam pemahaman masyarakat

mengenai pembuatane-KTP, akan tetapi pegawai kecamatan terus berupaya dalam meningkatkan informasi agar masyarakat mudah memahaminya. variabel-variabel pendukung keberhasilan implementasi sebagai berikut:

1. Komunikasi meliputi atas berbagai faktor antara lain, proses menyampaikan/transmisi, kejelasan serta konsistensi. Penyampaian informasi telah dilaksanakan dengan baik dan telah disampaikan melalui berbagai cara seperti pertemuan langsung di desa-desa, media sosial seperti Instagram, Tik-Tok, dan Facebook, dan pengiriman surat resmi.
2. Sumber daya meliputi atas empat faktor antara lain, staf, informasi, kewenangan serta fasilitas. Implementasi pelayanan penerbitan e-KTP di Kecamatan Kebakkramat telah menunjukkan keberhasilan dalam banyak aspek. Kehadiran sumber daya manusia yang cukup dan kompeten, didukung oleh pelatihan dan bantuan tenaga harian lepas, telah membantu dalam melaksanakan tugas dengan baik serta anggaran sudah sangat mencukupi dan tidak ada kendala
3. Disposisi meliputi atas dua faktor antara lain komitmen pegawai dan

insentif pegawai. Implementasi pelayanan e-KTP di Kecamatan Kebakkramat menunjukkan komitmen yang kuat dari para pegawai pada proses penjalanan kewajiban yang telah disesuaikan pada peraturan dan ketetapan yang telah diberlakukan.

4. Struktur birokrasi meliputi atas dua faktor antara lain Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. Struktur birokrasi terorganisir dengan baik, dimulai dari posisi tertinggi hingga yang terendah, dengan tugas-tugas yang terbagi secara jelas di bawahnya

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku

- Afan, G. (2009). *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Transisi Menuju Demokrasi
- Agustino, L. (2006). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua (terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Erwan Agus Puwanto). Gajah mada University Press.
- Edi Suharto. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Cetakan ke lima. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group)
- Mulyadi, 2015, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Samodra,W. (1994) *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta,Bandung
- Winarno, Budi. (2007), *Kebijakan Publik, teori dan Proses*,Jakarta
- Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Jurnal**  
Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan, 1(2), 1-10.
- Hanafı, I., & Ma'sum, M. (2015). *Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan: Peran Komite*



Sekolah Pada Sekolah Menengah

Kejuruan. Jurnal Cakrawala

Pendidikan, 34(1),1-10

**Undang – Undang**

Undang – Undang nomer 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan

Undang – Undang Nomer 25 Tahun 2009

tentan Pelayanan Publik

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82  
Tahun 2019 Tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi  
Kependudukan